

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR

Muhammad Firdiansyah Adiwirya¹
I Putu Sudana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: Firdi_Adiwirya@yahoo.com / telp: +62 81 936 10 09 39

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan aspek akuntabilitas dan transparansi agar kualitas anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran. Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar dengan menggunakan metode kuesioner. Regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja. Secara parsial, transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini, menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, anggaran berbasis kinerja

ABSTRACT

Performance-based budgeting is a budgeting that notices the priority programs and activities. In practice, it takes accountability and transparency so that the quality of the budget in accordance with the goals and objectives. The purpose of this research was to examine the effect of accountability and transparency in performance-based budgeting. This research was conducted in Denpasar by using questionnaires. Multiple linear regression was used as a technique of data analysis in this study. This study concluded that the accountability and transparency has simultaneous positive effect on performance-based budgeting. Partially, transparency has positive influence on performance-based budgeting. This study shows that the respondents have a more skewed perception of transparency compared with accountability.

Keywords: accountability, transparency, performance-based budgeting

PENDAHULUAN

Bergulirnya era reformasi di Indonesia, telah menghadirkan titik perubahan pada tubuh pemerintahan salah satu di antaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Beralihnya masa orde baru menjadi era reformasi menimbulkan desakan baru terhadap pemerintah (Asmadewa, 2006). Perubahan dimulai dari agenda reformasi yang salah satunya yaitu desentralisasi keuangan dan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sukesti dan Alfasadun, 2011). Adanya desentralisasi mengharuskan sistem pengelolaan keuangan daerah dikelola mandiri oleh pemerintah daerah (Jayanti dkk., 2014).

Haspiarti (2012) mengatakan hadirnya reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia melalui sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Hal senada diungkapkan oleh Andriani (2012) yang menyatakan bahwa anggaran tradisional yang diterapkan dahulu, telah tergantikan oleh anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Penekanan terhadap efisiensi, efektivitas dan ekonomis menjadi inti dari metode penganggaran berbasis kinerja (Kurniawan, 2009).

Berjalannya reformasi semakin menghidupkan kembali arti demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi identik halnya dengan akuntabilitas. Menerapkan akuntabilitas berarti menerapkan transparansi pula sehingga di antara akuntabilitas dengan transparansi memiliki keterkaitan (Mohamad dkk., 2004:33). Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi

keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006:43). Lain hal dengan transparansi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011:112). Pada akhirnya, unsur akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan (Hudayah, 2012), khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Sadjiarto (2000) menyatakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah kerap terjadi dan muncul ke permukaan sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja pemimpin daerah. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kota-kota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan tersebut salah satunya di Kota Denpasar.

Hasil dari Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan diserahkan untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengamatannya terhadap perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang/jasa, serta pelayanan publik mendapatkan usulan perbaikan (*area of improvement*) pada SKPD Kota Denpasar yang menjadi *sampling*. Lalu, sorotan mengenai masalah struktur anggaran yang belum sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran seperti belanja modal yang dirancang oleh masing-masing

SKPD cukup kecil padahal alokasi belanja modal bisa lebih besar dari yang ditetapkan sehingga berakibat pada program-program SKPD yang kurang inovatif dan monoton (dimuat dalam portal berita <http://denpostnews.com>).

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Asrida (2012), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen, dan akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen. Berbeda dengan Meutia dan Nurfitriana (2011), yang menunjukkan bahwa hasil penelitian secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Secara parsial variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas juga berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Ardhiarisca (2012) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa secara parsial akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif pada kinerja. Hubungan antara pertanggungjawaban dengan kinerja berpengaruh negatif signifikan sedangkan variabel transparansi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Lain hal dengan penelitian Auditya dkk. (2013) didapatkan hasil analisis bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah sedangkan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat cukup alasan guna mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi di dalam penyusunan

anggaran berbasis kinerja pada SKPD Kota Denpasar. Terdapatnya perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya memberikan cukup acuan untuk meneliti kinerja pemerintah Kota Denpasar, terkait dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada anggaran tersebut.

Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan teori keagenan sebagai fondasi teoritisnya. Teori keagenan merupakan suatu kondisi di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen, yang nantinya akan menjalankan amanat prinsipal sesuai ketentuan yang diberikan (Mack dan Ryan, 2006). Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah dalam pelimpahan wewenang (keagenan). Keterkaitan prinsipal dengan agen dapat diketahui dengan melacak proses-proses anggaran (Moe, 1984). Hal ini menandakan bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, mengindikasikan munculnya asimetri informasi, yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat/DPRD sebagai *principal* dan pihak eksekutif (SKPD) yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi ke dalamnya.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda. Namun dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Hasil riset Meutia dan Nurfitriana (2011) menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis

kinerja. Mengacu penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar.

Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas menunjukkan bagaimana kemampuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Asrida (2012) menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen. Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Akuntabilitas berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar.

Kurniawan (2003) mengemukakan, bahwa transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Sejalan dengan itu, penelitian Anugriani (2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone, menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Transparansi berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Kota Denpasar menjadi lokasi dalam penelitian ini. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai SKPD Kota Denpasar yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, pihak-pihak tersebut meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sampel penelitian ditentukan dengan *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner. Kuesioner disebarlang langsung kepada responden di 33 SKPD. Sebanyak 107 kuesioner yang kembali digunakan sebagai data penelitian.

Terdapat tiga jenis variabel dalam penelitian ini. Akuntabilitas (X₁) dan transparansi (X₂) merupakan variabel independen sedangkan anggaran berbasis kinerja merupakan variabel dependen (Y). Akuntabilitas dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Krina (2003) yaitu keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai sasaran suatu program, penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, sistem informasi manajemen dan *monitoring* hasil, akses publik pada informasi atas suatu keputusan serta mekanisme pengaduan masyarakat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, proses pembuatan sebuah keputusan

yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dan kejelasan dari sasaran kebijakan. Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Hadyrianto (2012).

Transparansi dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Krina (2003) yaitu akses informasi yang mudah, menyusun suatu mekanisme pengaduan tentang pelanggaran, meningkatkan arus informasi melalui media massa dan lembaga non pemerintahan, dan penyediaan informasi tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Sopanah dan Wahyudi (2010). Anggaran berbasis kinerja dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 (2008) yaitu masukan (*Input*), keluaran (*output*), efisiensi, kualitas (*quality*), dan hasil (*outcome*). Keseluruhan indikator tersebut tersaji ke dalam 10 pernyataan kuesioner yang diadopsi dari Anugriani (2014). Kuesioner penelitian ini mengandung perpaduan pernyataan positif dan negatif di setiap kuesioner, sehingga dalam pengolahan data diperlukan konversi skor untuk menyesuaikan.

Analisis regresi linear berganda menjadi metode analisis dalam riset ini. Mengingat data penelitian ini merupakan data ordinal, maka tahap awal yang dilakukan adalah mengubah data ordinal menjadi data interval melalui uji *Method*

of Successive Interval (MSI). Setelah melalui tahap tersebut, data penelitian harus melewati uji instrumen, analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Uji instrumen terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama-tama sebelum melakukan analisis dan pengujian, terlebih dahulu dipaparkan mengenai data awal yang menjadi dasar penelitian ini. Data awal dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban responden pada kuesioner. Setelah itu, diproses kembali untuk menyesuaikan skor karena terdapat beberapa pernyataan negatif sehingga skor harus diubah sesuai ketentuan. Lebih lanjut lagi, data yang telah dikonversi skornya, akan melewati tahap selanjutnya yakni tahap transformasi data ordinal menjadi data interval menggunakan MSI.

Data tersebut kemudian melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memisahkan antara pernyataan yang valid dengan yang tidak valid. Setelah melalui tahap tersebut barulah disesuaikan dengan indikator masing-masing pada setiap variabel. Data ini disebut data komposit yang nantinya siap dipakai untuk analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.

Uji validitas dilakukan guna mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian. Apabila nilai *pearson correlation* terhadap skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2009:188). Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan *software SPSS (Statistic Package for the Social Science)*, nilai korelasi *product moment* dari tiap-tiap *item*/pernyataan diperoleh hasil bahwa untuk seluruh *item*/pernyataan pada kuesioner akuntabilitas, besarnya

di atas 0,3 sehingga dapat dikatakan valid. Pada kuesioner transparansi hanya 8 *item*/pernyataan yang valid sehingga 2 *item*/pernyataan harus dibuang dari instrumen penelitian. Begitu pula dengan kuesioner anggaran berbasis kinerja yang hanya 8 *item*/pernyataan valid, sehingga sisanya harus dibuang dari instrumen penelitian.

Uji reliabilitas atau kehandalan menunjukkan seberapa jauh suatu pengukuran menghasilkan kekonsistenan jika diukur dengan gejala dan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2009:172). Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* di atas 0,6 (Sugiyono, 2009:188). Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan *software SPSS* didapat nilai *cronbach's alpha* setiap variabel diperoleh hasil lebih besar dari 0,60. Hasil ini menunjukkan semua variabel dalam kuesioner dikatakan reliabel.

Analisis statistik deskriptif, analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang terdiri atas akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan anggaran berbasis kinerja (Y) melalui nilai rata-rata, nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi. Statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X_1	107	16,7479	33,7570	24,831629	2,9343826
X_2	107	9,8103	20,6371	14,384292	1,9300370
Y	107	14,2939	25,9139	18,046386	2,4107009

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil yang didapat, variabel akuntabilitas (X_1) memiliki nilai yang berkisar dari 16,7479-33,7570 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar

24,831629 yang apabila dibagi dengan 7 (jumlah indikator pada akuntabilitas) akan menghasilkan nilai 3,54 (hasil pembulatan) dengan standar deviasi sebesar 2,9343826. Artinya rata-rata responden memberikan skor 3 untuk *item*/pernyataan pada kuesioner akuntabilitas.

Variabel transparansi (X_2) memiliki nilai yang berkisar dari 9,8103-20,6371 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14,384292 yang apabila dibagi dengan 4 (jumlah indikator pada transparansi) akan menghasilkan nilai 3,6 (hasil pembulatan) dengan standar deviasi sebesar 1,9300370. Artinya rata-rata responden memberikan skor 3 untuk *item*/pernyataan pada kuesioner transparansi.

Variabel anggaran berbasis kinerja (Y) memiliki nilai yang berkisar dari 14,2939-25,9139 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,046386 yang apabila dibagi dengan 5 (jumlah indikator pada anggaran berbasis kinerja) akan menghasilkan nilai 3,61 (hasil pembulatan) dengan standar deviasi sebesar 2,4107009. Artinya rata-rata responden memberikan skor 3 untuk *item*/pernyataan pada kuesioner anggaran berbasis kinerja.

Uji normalitas, uji ini adalah mendeteksi normal atau tidaknya distribusi yang dimiliki variabel residual dalam model regresi. Uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) digunakan dalam uji ini. Apabila *Asymp. Sig* (2-tailed) > α (0,05) maka data dikatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas selengkapnya ditampilkan pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	107
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,374
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,999

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil yang didapat, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,999 ($0,999 > 0,05$). Hal ini menunjukkan model regresi pada riset ini terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi yang dibuat lalu dilihat berdasarkan matriks korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Collinearity Statistics</i>		
Variabel	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0,855	1,170
Transparansi	0,855	1,170

Sumber: Data Diolah, 2014

Uji heteroskedastisitas, menggunakan uji *Spearman's Rho*. Apabila nilai signifikansinya berada di atas 0,05 maka model regresi ini dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Spearman's rho</i>	Akuntabilitas	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,875
		N	107
	Transparansi	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,923
		N	107

Sumber: Data Diolah, 2014

Data tersebut memaparkan nilai *sig. (2-tailed)* dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap *Unstandardized Residual* adalah 0,875 dan 0,923 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *sig. (2-tailed)* akuntabilitas dan tranparansi di atas 0,05. Hasil ini menandakan seluruh variabel independen dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini. Hasil pengujian selengkapnya ditampilkan dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	6,713	3,526	0,001
X1	0,096	1,320	0,190
X2	0,623	5,642	0,000
$R^2 = 0,306$		F = 22,962	
$Adj. R^2 = 0,293$		Sig = 0,000	

Sumber: Data diolah, 2014

Hasil tersebut memaparkan bahwa *adjusted R²* bernilai 0,293 yang memiliki arti bahwa 29,3% variasi anggaran berbasis kinerja mampu dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sementara sisanya sebesar 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam riset ini. Untuk melakukan pengujian pertama dapat melihat tabel di atas bahwa nilai F_{hitung} lebih

besar daripada F_{tabel} ($22,962 > 3,08$) dengan tingkat signifikansi uji F dua sisi $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan pula arah positif, sehingga perlu penekanan arah dalam hasil pengujian tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Nurfitriana (2011).

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan melihat hasil data pada tabel 5 yang didapatkan t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,320 < 1,65922$) dengan tingkat signifikansi uji t dua sisi $0,190 > 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar ditolak. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Asrida (2012), Meutia dan Nurfitriana (2011), Ardhiarisca (2012), dan Auditya dkk. (2013).

Uji hipotesis ketiga dilakukan dengan mengamati hasil data pada tabel 5 yang didapat t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,642 > 1,65922$) dengan tingkat signifikansi uji t dua sisi $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan pula arah positif, sehingga perlu penekanan arah dalam hasil pengujian tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meutia dan Nurfitriana (2011), Ardhiarisca (2012), dan Auditya dkk. (2013), Hadyrianto (2012), dan Anugriani (2014) akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Asrida (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas.

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi SKPD Kota Denpasar maka dapat disarankan untuk lebih memperhatikan akuntabilitas dan transparansi pada anggaran berbasis kinerja di setiap SKPD Kota Denpasar. Diharapkan pula, dilakukannya berbagai upaya seperti memberikan penyegaran atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas pada anggaran berbasis kinerja. Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah potensi terjadinya subjektivitas para responden dalam memberikan jawaban atas kuesioner yang disodorkan. Para peneliti yang mengambil tema anggaran berbasis kinerja dapat mempertimbangkan metode pengambilan data yang mampu mengurangi tingkat subjektivitas responden, yaitu dengan menggunakan menggunakan metode wawancara yang mendalam sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat.

REFERENSI

- Andriani, Andi. 2012. Implementasi Strategi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Universitas Hasanuddin. *Tesis* Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anugriani, Rezky Mulya. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ardhiarisca, Oryza. 2012. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.
- Asmadewa, I. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Survei pada Pemerintah Pusat). *Tesis* UGM. Yogyakarta.
- Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*. 1(1). 29-40.
- Auditya, Lucy., Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. 3(1). 21-41.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2008. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Hadyrianto, Pahala. 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2(1). 53-64.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.

- Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare). *Skripsi Universitas Hasanudin*. Makasar.
- Hudayah, Syarifah. 2012. Pengetahuan Anggaran, Efektivitas, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Hubungannya dengan Kepuasan. *Jurnal Borneo Administrator*. 8(1). 50-74.
- Hunt, G. 2006. *The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing. In Open Government in a Theoretical and Practical Context, Ed. R. Chapman and M. Hunt Burlington : VT Ashgate.*
- Jayanti, Ika Puspita., Sjamsuddin, Sjamsiar., dan Wachid, Abdul. 2014. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 2(2). 300-305.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kurniawan. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan. *Skripsi UPI*. Jakarta.
- Kurniawan, J.Luthfi. 2003. *Diskusi Anggaran Publik*. Malang: Malang Corruption Watch.
- Mack, Janet., and Ryan, Christine. 2006. Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 19(4).592-612.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Meutia, Rita dan Nurfitriana. 2011. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(2). 93-107.
- Moe, Terry M. 1984. The New Economics of Organizations. *American Journal of Political Science*. 28(5). 739-777.
- Mohamad, Ismail., Rasul, Sjahrudin., dan Umar, Haryono. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

- Redaksi Denpost. 2013. Dewan Nilai Program SKPD Kurang Inovatif. <http://www.denpostnews.com/metro-denpasar/>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian direvisi dengan peraturan baru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2). 138-150.
- Sekretariat Humas Bali. 2012. Melalui Seminar Pencegahan Korupsi Kota Denpasar Tingkatan Kualitas Pelayanan Publik. <http://www.bpkp.go.id/bali/berita/read/9474/65/>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2014.
- Shende, Suresh and Bennett, Tony. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. <http://ejournal.umm.ac.id>. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2014.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukesti, Fatmasari dan Alfasadun. 2011. Transparansi APBD sebagai Sarana Akuntabilitas Publik dan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang*. 2(1). 1-12.